



Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Subang Tahun 2020 - 2024

Hafizh Khoiri Primawan^{1*}, Syifa Rachmania Komara²

^{1,2} Universitas Padjadjaran

* E-mail Korespondensi: hafizh2203@mail.unpad.ac.id

Information Article

History Article

Submission: 01-05-2026

Revision: 19-05-2026

Published: 21-05-2026

DOI Article:

10.24905/permana.v17i3.1515

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Subang melalui indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran selama periode 2020–2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memahami secara mendalam hubungan antara kebijakan penganggaran daerah dan capaian indikator kesejahteraan masyarakat. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terhadap dokumen APBD serta publikasi statistik resmi pemerintah daerah. Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alokasi APBD Kabupaten Subang telah diarahkan pada sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur yang berkontribusi terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia secara bertahap. Namun demikian, dampak APBD terhadap penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran masih terbatas karena dipengaruhi oleh kondisi ekonomi daerah dan efektivitas implementasi program pembangunan. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada penggunaan pendekatan kualitatif yang tidak mengukur hubungan secara statistik. Meskipun demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami bagaimana kebijakan penganggaran daerah dapat memengaruhi kesejahteraan masyarakat serta menjadi dasar evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan APBD.

Kata Kunci: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kesejahteraan masyarakat, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kemiskinan, pengangguran, pembangunan daerah

Acknowledgment

3708



ABSTRACT

This study aimed to analyze of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) in improving community welfare in Subang Regency through indicators of the Human Development Index (HDI), poverty rate, and unemployment rate during the period 2020–2024. The study employed a qualitative approach with a case study design to gain an in- depth understanding of the relationship between regional budgeting policies and the achievement of community welfare indicators. Data were collected through interviews, observations, and documentation studies of APBD documents as well as official statistical publications issued by the local government. Data analysis was conducted using an interactive analysis model consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings showed that the allocation of the APBD in Subang Regency had been directed toward priority sectors such as education, health, and infrastructure development, which gradually contributed to the improvement of the Human Development Index. However, the impact of the APBD on reducing poverty and unemployment remained limited due to regional economic conditions and the effectiveness of development program implementation. This study was limited by the use of a qualitative approach that did not measure statistical relationships. Nevertheless, the findings provided valuable insights into how regional budgeting policies influence community welfare and offered an evaluative basis for improving the effectiveness of APBD management at the local government level.

Keyword: *Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD), community welfare, Human Development Index (HDI), poverty, unemployment, regional development*

© 2026 Published by Permana. Selection and/or peer-review under responsibility of Permana

PENDAHULUAN

Pembangunan memiliki peran penting dalam mendukung daerah keberhasilan pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Dalam era desentralisasi, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengelola sumber daya serta merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah. Salah satu instrumen utama yang digunakan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pembangunan tersebut adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

3709



(APBD), yang berperan sebagai alat kebijakan fiskal untuk membiayai program pembangunan dan pelayanan publik di tingkat daerah (Todaro & Smith, 2015).

Sejak diterapkannya kebijakan desentralisasi melalui otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengelola sumber daya serta merumuskan kebijakan pembangunan daerah untuk meningkatkan efektivitas pembangunan melalui pengelolaan keuangan daerah yang lebih mandiri dan akuntabel (Mardiasmo, 2018). Dengan adanya kewenangan tersebut, pemerintah sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayah masing-masing. Kebijakan desentralisasi fiskal memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah diharapkan mampu merancang program pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Salah satu instrumen utama yang digunakan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pembangunan tersebut adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan serta penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat daerah. Dalam perspektif ekonomi publik, APBD memiliki fungsi strategis sebagai instrumen kebijakan fiskal daerah yang berperan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi, mendistribusikan pendapatan, serta menjaga stabilitas ekonomi daerah (Sasana, 2019). Melalui pengelolaan APBD yang efektif, pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.

Efektivitas pengelolaan APBD sangat menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Alokasi anggaran yang tepat sasaran dapat mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan, sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi lokal (Wibowo, 2021). Sebaliknya, pengelolaan anggaran yang tidak optimal dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan daerah dan berdampak pada rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan penganggaran daerah menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi daerah.

Dalam konteks pembangunan daerah, kesejahteraan masyarakat umumnya diukur melalui beberapa indikator sosial ekonomi yang mencerminkan kualitas hidup masyarakat. Salah satu indikator yang banyak digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM



merupakan indikator komposit yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak (*United Nations Development Programme*, 2020). Selain IPM, indikator lain yang sering digunakan untuk menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat adalah tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka. Tingkat kemiskinan menunjukkan proporsi penduduk yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, sedangkan tingkat pengangguran mencerminkan kondisi pasar tenaga kerja serta kesempatan kerja yang tersedia bagi masyarakat (Badan Pusat Statistik, 2023).

Hubungan antara pembangunan manusia, kemiskinan, dan pengangguran merupakan isu penting dalam pembangunan ekonomi daerah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja serta memperluas peluang ekonomi masyarakat. Hal ini pada akhirnya dapat berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran (Arsyad, 2016). Sebaliknya, tingginya tingkat pengangguran dapat memperburuk kondisi kesejahteraan masyarakat karena menurunkan pendapatan rumah tangga dan meningkatkan kerentanan sosial ekonomi (Sukirno, 2017).

Kabupaten Subang merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Barat yang memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, terutama pada sektor pertanian, industri, dan perdagangan. Keberadaan kawasan industri serta pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut diharapkan mampu meningkatkan aktivitas ekonomi daerah serta membuka peluang kerja bagi masyarakat. Namun demikian, perkembangan ekonomi daerah tidak selalu diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata. Selain itu, dinamika indikator kesejahteraan seperti Indeks Pembangunan Manusia, kemiskinan dan tingkat pengangguran juga menunjukkan perkembangan yang perlu mendapat perhatian.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji hubungan antara pembangunan manusia, kemiskinan, dan pengangguran dalam konteks pembangunan ekonomi daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Sasana (2019) menunjukkan bahwa belanja pemerintah daerah memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan pembangunan manusia. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Wibowo (2021) juga menunjukkan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.



Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut lebih menekankan pada analisis hubungan antar variabel ekonomi secara umum. Kajian yang secara khusus menganalisis bagaimana kebijakan fiskal daerah melalui APBD berperan dalam memengaruhi indikator kesejahteraan masyarakat masih relatif terbatas, khususnya pada tingkat pemerintah daerah. Padahal, kebijakan penganggaran daerah memiliki peran penting dalam menentukan arah pembangunan serta efektivitas program-program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran APBD sebagai instrumen kebijakan fiskal daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui tiga indikator utama, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran. Penelitian ini mengambil studi kasus di Kabupaten Subang selama periode 2020-2024 untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana kebijakan penganggaran daerah berkontribusi terhadap dinamika kesejahteraan masyarakat di tingkat daerah.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian ekonomi pembangunan daerah, khususnya yang berkaitan dengan peran kebijakan fiskal daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengelolaan APBD yang lebih efektif dan tepat sasaran guna mendorong pembangunan daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Pembangunan di daerah memiliki peran penting dalam mendukung daerah keberhasilan pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Dalam era desentralisasi, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengelola sumber daya serta merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan karakteristik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis secara mendalam peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Subang selama periode 2020 – 2024. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak hanya berfokus pada analisis data statistik, tetapi juga bertujuan memahami proses perencanaan, pengalokasian, serta implementasi kebijakan fiskal daerah yang berpengaruh terhadap indikator kesejahteraan masyarakat.

3712



Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini melibatkan beberapa informan yang memiliki keterkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah dan perencanaan pembangunan, yaitu dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D), Badan Pusat Statistik (BPS). Informan dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap pengelolaan APBD dan kondisi kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan serta observasi lapangan untuk memahami proses implementasi kebijakan pembangunan daerah. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap dokumen resmi seperti laporan realisasi APBD, dokumen perencanaan pembangunan daerah, serta publikasi statistik yang relevan dengan periode penelitian. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Proses analisis dilakukan secara berkelanjutan sejak tahap pengumpulan data hingga interpretasi hasil penelitian. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan serta dokumen resmi yang relevan.

HASIL

Peran APBD dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kemiskinan, dan pengangguran terbuka merupakan instrumen kebijakan fiskal daerah yang memiliki peran strategis dalam mendorong peningkatan kualitas pembangunan manusia. Melalui alokasi anggaran pada sektor pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur dasar, pemerintah daerah berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka analisis kinerja pelaksanaan APBD dilakukan terhadap APBD serta analisis kinerja pelaksanaan APBD yang pada dasarnya bertujuan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Kinerja pelaksanaan APBD tahun sebelumnya dapat dilihat dari aspek tingkat realisasi atau penyerapan APBD setiap tahunnya yang dapat diketahui dari kinerja pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Berikut realisasi pendapatan APBD Kabupaten Subang Tahun 2020 - 2024 :

3713

Realisasi APBD Kabupaten Subang Tahun 2020-2024

Tabel 1. Realisasi APBD Kabupaten Subang Tahun 2020-2024

No	Kategori	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Pendapatan						
	A. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 461.444.957.847,00	Rp. 494.538.909.986,00	Rp. 494.878.619.672,00	Rp. 594.663.800.310,00	Rp. 718.193.945.693,00	12,04%
	B. Pendapatan Transfer	Rp. 2.255.941.556.496,00	Rp. 2.444.543.276.342,00	Rp. 2.539.387.895.206,00	Rp. 2.652.724.594.807,00	Rp. 2.938.173.335.482,00	5,80%
	C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp. 176.563.579.345,00	Rp. 212.004.321.000,00	Rp. 43.244.283.481,00	Rp. 39.203.073.646,00	Rp. 19.945.120.000,00	-30,27%
	Jumlah Pendapatan	Rp. 2.994.002.063.688,00	Rp. 3.151.086.507.328,00	Rp. 3.099.610.802.360,00	Rp. 3.286.595.470.769,00	Rp. 3.696.270.083.732,00	5,53%
2	Belanja						
	A. Belanja Operasional	Rp. 2.079.363.735.220,00	Rp. 2.249.592.323.507,00	Rp. 2.264.719.821.042,00	Rp. 2.338.963.844.370,00	Rp. 2.674.264.679.218,00	6,62%
	B. Belanja Modal	Rp. 237.946.985.193,00	Rp. 371.017.008.669,00	Rp. 372.843.803.567,00	Rp. 309.073.257.522,00	Rp. 401.909.680.498,00	14,31%
	C. Belanja Tak Terduga	Rp. 81.316.674.723,00	Rp. 3.254.704.967,00	Rp. 844.814.300,00	Rp. 7.077.731.348,00	Rp. 1.418.205.496,00	120,09%
	D. Belanja Transfer	Rp. 487.883.345.700,00	Rp. 474.487.346.251,00	Rp. 331.744.677.483,00	Rp. 569.288.919.087,00	Rp. 555.144.032.483,00	3,37%
	Jumlah Belanja	Rp. 3.906.510.780.836,00	Rp. 3.120.311.433.494,00	Rp. 3.170.153.114.436,00	Rp. 3.224.405.762.327,00	Rp. 3.605.736.617.896,00	5,82%
	Surplus/Defisit	Rp. 87.491.282.852,00	Rp. 30.775.153.754,00	-Rp. 70.542.312.076,00	-Rp. 62.189.718.442,00	Rp. 90.533.465.827,00	-134,16%
3	Pembayaran						
	A. Pembiayaan Pembiayaan	Rp. 18.613.290.617,00	Rp. 88.898.706.789,00	Rp. 157.673.860.593,00	Rp. 30.131.548.427,00	Rp. 85.030.266.869,00	127,23%
	B. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 17.205.776.790,00	Rp. 12.900.000.000,00	Rp. 7.000.000.000,00	Rp. 7.291.000.000,00	Rp. 1.291.000.000,00	-37,31%
	Pembayaran Rata	Rp. 1.407.423.917,00	Rp. 76.898.706.789,00	Rp. 100.673.860.593,00	Rp. 22.840.548.427,00	Rp. 83.739.266.869,00	1394,01%
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SIPA)	Rp. 88.898.706.789,00	Rp. 107.673.860.593,00	Rp. 30.131.548.427,00	Rp. 85.030.266.869,00	Rp. 174.272.732.696,00	59,06%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kab. Subang 2025

Berdasarkan tabel Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Subang Tahun 2020–2024, dapat diketahui bahwa kinerja keuangan daerah menunjukkan perkembangan yang cenderung positif dari tahun ke tahun. Total pendapatan daerah mengalami peningkatan dari Rp2,99 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp3,69 triliun pada tahun 2024 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,53%. Kenaikan tersebut didorong oleh meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tumbuh dari Rp461,44 miliar menjadi Rp718,19 miliar dengan rata-rata pertumbuhan 12,04%, yang menunjukkan adanya peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan internal.

Selain itu, Pendapatan Transfer masih menjadi komponen terbesar dalam struktur pendapatan daerah dengan nilai mencapai Rp2,95 triliun pada tahun 2024, sehingga mengindikasikan bahwa Kabupaten Subang masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap bantuan keuangan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah. Di sisi lain, komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah justru mengalami penurunan cukup signifikan dengan rata-rata pertumbuhan negatif sebesar -30,27%, yang menunjukkan berkurangnya kontribusi penerimaan dari sumber pendapatan tambahan seperti hibah dan bantuan lainnya.

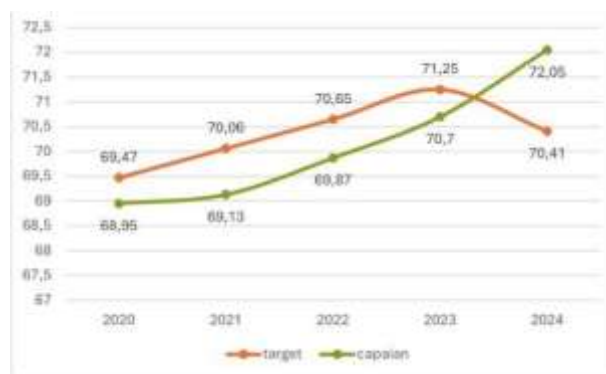
Dari sisi pengeluaran, total belanja daerah juga mengalami peningkatan dari Rp2,90 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp3,60 triliun pada tahun 2024 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,62%. Belanja operasional menjadi komponen pengeluaran terbesar setiap tahunnya, yang menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran masih dialokasikan untuk kebutuhan rutin

pemerintahan dan pelayanan administratif. Sementara itu, belanja modal juga mengalami pertumbuhan dengan rata-rata sebesar 14,31%, yang mencerminkan adanya peningkatan alokasi anggaran terhadap pembangunan sarana, prasarana, dan infrastruktur daerah.

Secara keseluruhan, kondisi APBD Kabupaten Subang selama periode tersebut cenderung berada dalam keadaan surplus, meskipun sempat mengalami defisit pada tahun 2022 sebesar Rp70,54 miliar akibat ketidakseimbangan sementara antara pendapatan dan belanja daerah. Namun demikian, surplus kembali tercapai pada tahun-tahun berikutnya hingga mencapai Rp90,53 miliar pada tahun 2024, yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah cukup mampu menjaga stabilitas fiskal dan mengelola keseimbangan anggaran secara baik dalam mendukung keberlangsungan pembangunan daerah.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Subang Tahun 2020-2024

Selama periode 2020–2024, perkembangan IPM Kabupaten Subang menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Meskipun pada awal periode sempat mengalami tekanan akibat pandemi COVID-19 yang berdampak pada berbagai aspek sosial ekonomi, kondisi tersebut secara bertahap mampu dipulihkan. Peningkatan paling signifikan terjadi pada tahun 2024 dengan kenaikan sebesar 1,35 poin, yang menjadi pertumbuhan tertinggi dalam lima tahun terakhir.



Grafik 1. Capaian dan Target Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2020-2024

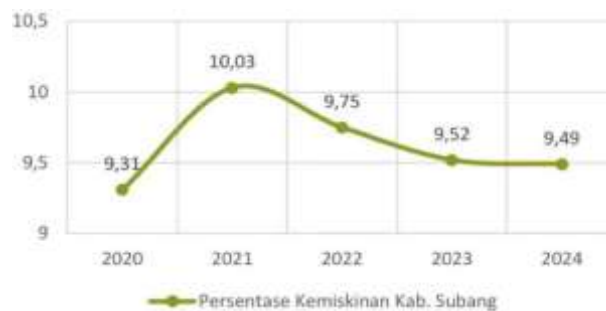
Sumber : BPS Kabuten Subang, 2024

Kondisi tersebut mengindikasikan masih adanya berbagai tantangan pembangunan yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah, salah satunya terkait dengan tingkat pengangguran. Tingginya angka pengangguran dapat memengaruhi kemampuan masyarakat dalam memperoleh pendapatan yang memadai, yang pada akhirnya berdampak pada pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Kedua aspek tersebut merupakan kompo-

nen penting dalam pembentukan IPM dan saling berkaitan erat dengan kondisi ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, upaya menurunkan tingkat pengangguran menjadi langkah strategis dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mempercepat pertumbuhan IPM di Kabupaten Subang.

Kemiskinan Kabupaten Subang Tahun 2020-2024

Kemiskinan merupakan salah satu indikator penting dalam menilai tingkat kesejahteraan masyarakat karena mencerminkan kondisi ketimpangan sosial serta keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi yang mendasar. Dalam konteks pembangunan daerah, upaya pengukuran dan penanggulangan kemiskinan tidak hanya menjadi tujuan utama kebijakan publik, tetapi juga menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintah dalam menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kondisi kemiskinan secara komprehensif menjadi sangat penting agar kebijakan yang diambil mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat dan berkelanjutan.



Grafik 2. Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Subang 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Subang yang dikelola dalam SIPD, 2024

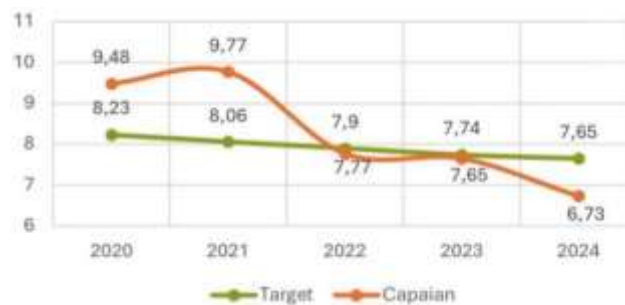
Perkembangan persentase penduduk miskin di Kabupaten Subang selama periode 2020–2024 menunjukkan dinamika yang cukup dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi, terutama akibat dampak pandemi COVID-19. Pada tahun 2021, angka kemiskinan tercatat mencapai titik tertinggi sebesar 10,03%, meningkat dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 9,31%. Peningkatan tersebut mencerminkan tekanan ekonomi yang dialami masyarakat akibat perlambatan aktivitas ekonomi dan menurunnya kesempatan kerja. Namun demikian, sejak tahun 2022 hingga 2024 persentase penduduk miskin mulai menunjukkan tren penurunan yang relatif konsisten, yaitu menjadi 9,75% pada tahun 2022, 9,52% pada tahun 2023, dan kembali turun menjadi 9,49% pada tahun 2024. Kondisi ini mengindikasikan adanya proses pemulihan ekonomi yang berlangsung secara bertahap, didukung oleh berbagai kebijakan pemerintah seperti program perlindungan sosial, pemulihan ekonomi daerah, serta peningkatan dukungan

bagi kelompok masyarakat rentan.

Meskipun penurunan persentase penduduk miskin memberikan gambaran positif terhadap perbaikan kesejahteraan masyarakat, indikator tersebut belum sepenuhnya mampu menggambarkan kondisi kemiskinan secara menyeluruh. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif, analisis perlu dilengkapi dengan indikator lain yang mencerminkan kualitas kemiskinan. Dalam hal ini, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan menjadi ukuran penting karena mampu menunjukkan seberapa jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin berada di bawah garis kemiskinan, serta menggambarkan tingkat ketimpangan pengeluaran di antara kelompok masyarakat miskin itu sendiri. Dengan mengombinasikan ketiga indikator tersebut, gambaran mengenai kondisi kemiskinan di suatu daerah dapat dipahami secara lebih utuh dan mendalam.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Subang Tahun 2020-2024

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang menggambarkan persentase jumlah pengangguran terhadap total angkatan kerja dalam suatu wilayah. Selama periode 2020–2024, TPT di Kabupaten Subang menunjukkan pergerakan yang fluktuatif dengan peningkatan yang cukup tajam pada tahun 2021 sebagai dampak lanjutan dari pandemi COVID-19 yang melemahkan aktivitas ekonomi dan memengaruhi stabilitas sektor ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja di sektor informal serta kelompok masyarakat rentan. Meskipun demikian, pada tahun-tahun berikutnya kondisi pasar tenaga kerja mulai mengalami perbaikan yang ditandai dengan penurunan angka pengangguran secara bertahap hingga tahun 2024. Penurunan tersebut menunjukkan adanya proses pemulihan ekonomi yang turut mendorong peningkatan kesempatan kerja, sehingga tingkat pengangguran di Kabupaten Subang semakin mendekati rata-rata provinsi maupun nasional, meskipun upaya peningkatan kualitas dan perluasan lapangan kerja masih perlu terus diperkuat.



Grafik 3. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Subang Tahun 2020- 2024

Sumber: BPS Kabupaten Subang yang dikelola dalam SIPD, 2025



Pada Grafik di atas Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Subang lebih tinggi dari nasional tetapi lebih rendah dari Jawa Barat menunjukkan bahwa kondisi ketenagakerjaan di Subang masih di bawah rata-rata Indonesia, namun relatif lebih baik dibandingkan kondisi rata-rata di tingkat provinsi. Tingginya TPT Subang dibandingkan nasional menunjukkan adanya tantangan struktural dalam penyerapan tenaga kerja di tingkat daerah. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat, TPT Kabupaten Subang sempat berada di atas rata-rata provinsi pada tahun 2023, namun kembali berada di bawah rata-rata provinsi pada tahun 2024.

Secara keseluruhan, perkembangan TPT di Kabupaten Subang selama kurun waktu tersebut menunjukkan dinamika yang cukup signifikan. Lonjakan pengangguran pada tahun 2021 menjadi refleksi nyata dari dampak lanjutan pandemi COVID-19 terhadap sektor ketenagakerjaan, terutama bagi pekerja sektor informal dan kelompok masyarakat rentan. Meskipun demikian, kondisi tersebut berangsur membaik pada tahun-tahun berikutnya, ditandai dengan penurunan TPT secara bertahap hingga tahun 2024 yang mengindikasikan adanya proses pemulihan pasar tenaga kerja di daerah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Subang. Melalui pengalokasian anggaran pada sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat, pemerintah daerah berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penganggaran daerah telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kemiskinan dan pengangguran terbuka yang mencerminkan adanya perbaikan pada aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat. Namun demikian, dampak APBD terhadap penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran masih menunjukkan hasil yang bertahap dan belum sepenuhnya optimal karena dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi serta efektivitas implementasi program pembangunan daerah.

Berdasarkan temuan tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Subang disarankan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pengelolaan APBD agar alokasi anggaran dapat lebih tepat sasaran dan memberikan dampak yang lebih besar terhadap peningkatan kesejahteraan



masyarakat. Penguatan koordinasi antar perangkat daerah juga perlu dilakukan agar program pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan saling mendukung dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Selain itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan program pemberdayaan ekonomi masyarakat serta pengembangan keterampilan tenaga kerja guna memperluas kesempatan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran sehingga dapat menganalisis hubungan antara kebijakan penganggaran daerah dan indikator kesejahteraan masyarakat secara lebih komprehensif serta memberikan kontribusi yang lebih luas bagi pengembangan kajian pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L. (2016). *Ekonomi pembangunan* (5th ed.). UPP STIM YKPN. https://books.google.com/books/about/Ekonomi_Pembangunan.html?id=6JxADwAAQBAJ
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Subang. (2024). *Kabupaten Subang dalam angka 2024*. Badan Pusat Statistik. <https://subangkab.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Subang. (2024). *Indeks pembangunan manusia Kabupaten Subang 2020–2024*. Badan Pusat Statistik. <https://subangkab.bps.go.id>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Data APBD pemerintah daerah Kabupaten Subang*. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. <https://djpk.kemenkeu.go.id>
- Mahmudi. (2019). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah* (4th ed.). UPP STIM YKPN. <https://opac.perpusnas.go.id>
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*. Andi Offset. <https://opac.perpusnas.go.id>
- Sasana, H. (2019). Pengaruh belanja pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 20(2), 115–126. <https://journal.unnes.ac.id>
- Sukirno, S. (2019). *Makroekonomi: Teori pengantar* (3rd ed.). Rajawali Pers.: <https://opac.perpusnas.go.id>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic development* (13th ed.). Pearson Education. <https://www.pearson.com>
- Wibowo, A. (2021). Pengaruh pengeluaran pemerintah daerah terhadap tingkat kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(1), 45–58. <https://journal.unair.ac.id>